

**ANALISIS DERAJAT KEMANDIRIAN DAN DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP KEMISKINAN DI ACEH
DI ERA OTONOMI KHUSUS**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

DIAN MAULANA RIZKI

NIM 4022018093



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2023

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS DERAJAT KEMANDIRIAN DAN DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP KEMISKINAN DI ACEH
ERA OTONOMI KHUSUS**

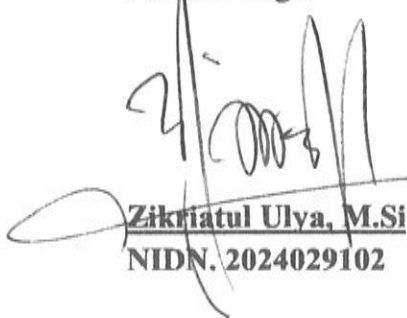
Oleh :

Dian Maulana Rizki
Nim. 4022018093

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

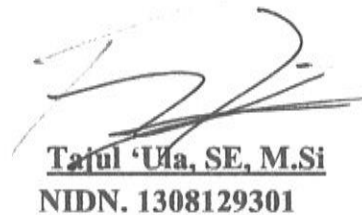
Langsa, 02 November 2022

Pembimbing I



Zikriatul Ulva, M.Si
NIDN. 2024029102

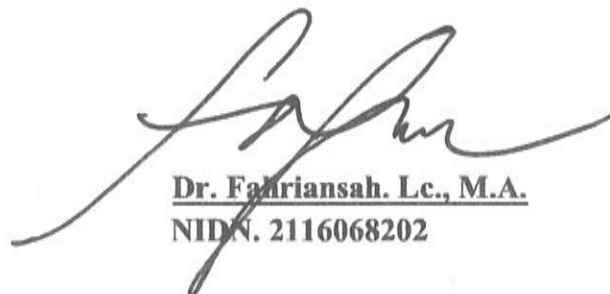
Pembimbing II



Tajul 'Ula, SE, M.Si
NIDN. 1308129301

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Fahriansah. Lc., M.A.
NIDN. 2116068202

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Derajat Kemandirian Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan Di Aceh Di Era Otonomi Khusus” an. Dian Maulana Rizki, NIM 4022018093 Program studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 27 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah.

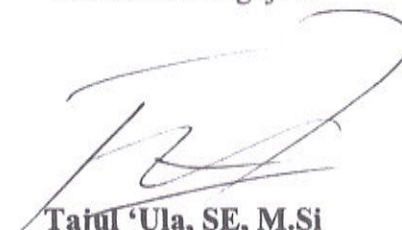
Langsa, 6 Februari 2023
Panitian Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Ketua/Penguji I



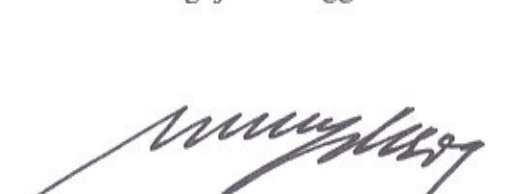
Zikriatul Ulya, M.Si
NIDN. 2024029102

Sekretaris/Penguji II




Tajul 'Ula, SE, M.Si
NIDN. 1308129301

Penguji III/Anggota



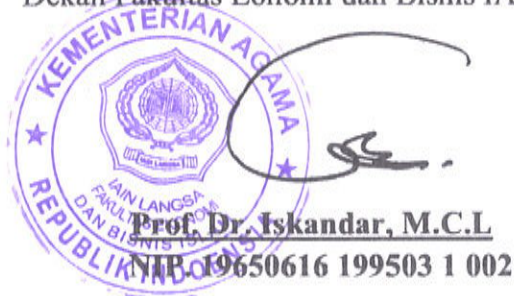
M. Yahya, SE, M.Si
NIP. 19651231 199905 1 001

Penguji IV/Anggota



Anis Kurlillah, M.Sh
NIP. 19980325 202203 1 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Langsa



Prof. Dr. Iskandar, M.C.L
NIP. 19650616 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Maulana Rizki

Nim : 4022018093

Tempat/tgl. Lahir : Lhokseumawe, 25 November 2000

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Jln. Medan - B. Aceh, Simpang Comodore Desa Birem
Puntong Kec. Langsa Baro, Kota Langsa Aceh

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "***ANALISIS DERAJAT KEMANDIRIAN DAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KEMISKINAN DI ACEH DI ERA OTONOMI KHUSUS.***" Benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 06 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Dian Maulana Rizki
Dian Maulana Rizki

ABSTRAK

Kemiskinan di provinsi Aceh masih tergolong tinggi, disisi lain pemerintah Aceh sudah didukung dengan adanya dana otonomi khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh derajat kemandirian fiskal dan derajat desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di 23 Kabupaten/Kota di provinsi Aceh periode tahun 2008 – 2021. Model penelitian yang digunakan adalah model regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM). Dari hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa kemandirian fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya, dari hasil pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa kemandirian fiskal dan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dari hasil analisis ini pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Aceh harus terus meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya, terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan derajat kemandirian dan desentralisasi fiskal yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan menurunkan jumlah kemiskinan di daerahnya.

Kata Kunci : Derajat Kemandirian Fiskal, Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemiskinan.

Abstract

Poverty in the province of Aceh is still relatively high, on the other hand the Aceh government has been supported by special autonomy funds. This study aims to analyze the effect of the degree of fiscal independence and the degree of fiscal decentralization on poverty in 23 districts/cities in Aceh province for the period 2008 – 2021. The research model used is a panel data regression model with a Random Effect Model (REM) approach. The partial test results show that fiscal independence has a negative and significant effect on poverty and fiscal decentralization has a positive and significant effect on poverty. Furthermore, the results of the simultaneous test show that fiscal independence and fiscal decentralization have a significant effect on poverty. From the results of this analysis, district/municipality governments in Aceh province must continue to increase their sources of regional income, especially from local taxes and regional levies so that they can increase the degree of independence and fiscal decentralization which have implications for economic growth and reduce poverty in their regions.

Keywords: Degree of Fiscal Independence, Degree of Fiscal Decentralization, Poverty.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan *tabi'i*. semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak semoga kita mendapat syafaatnya di hari penantian.

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dengan itu penulis menulis skripsi yang berjudul **“Analisis Derajat Kemandirian Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan Di Aceh Di Era Otonomi Khusus”**.

Upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Prof. Dr. Iskandar, M.C.L selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa,
3. Bapak Dr. Fahriansah. Lc., M.A. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Ibuk Zikriatul Ulya, M.Si selaku Pembimbing I yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan,

semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan karunianya kepada Ibuk sekeluarga.

5. Bapak Tajul 'Ula, SE, M.Si, selaku Pembimbing II yang telah sabar dan banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi. Terimakasih saya ucapkan atas waktunya, bimbingan, arahan dan masukan serta kesabaran ibu. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan membalas kebaikan Bapak.
6. Dosen IAIN Langsa khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk Ayah dan Ibunda tercinta yaitu Bapak Badruzzaman dan Ibu Darmalawati yang tiada henti-hentinya selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan staf dalam lingkungan IAIN Langsa yang telah membantu penulis dari awal memasuki perkuliahan hingga sekarang ini.
9. Terima Kasih kepada seluruh teman Ekonomi Syariah angkatan 2018 khususnya Unit 3 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu untuk waktu kebersamaan kita selama menempuh studi di IAIN Langsa.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu ekonomi islam untuk kita yang membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 06 Februari 2023

Dian Maulana Rizki
Nim. 4022018093

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Penelitian	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.5.1 Tujuan Penelitian	7
1.5.2 Manfaat Penelitian	7
1.6 Penjelasan Istilah.....	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Kemiskinan.....	10
2.1.1 Kemiskinan Dalam Perspektif Islam.....	10
2.1.2 Definisi Kemiskinan.....	10
2.1.3 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan.....	13
2.1.4 Indikator Kemiskinan.....	14
2.1.5 Macam-macam Kemiskinan.....	16
2.2 Kebijakan Fiskal.....	17
2.2.1 Pengertian Kebijakan Fiskal	17
2.2.2 Tujuan Kebijakan Fiskal	18
2.2.3 Fungsi Kebijakan Fiskal.....	21

2.2.4	Jenis Kebijakan Fiskal.....	22
2.2.5	Instrumen Kebijakan Fiskal	23
2.2.5.1	Pendapatan Daerah	23
2.2.5.2	Belanja Daerah	27
2.3	Kebijakan Fiskal di Indonesia	31
2.3.1	Tujuan Kebijakan Fiskal di Indonesia.....	31
2.3.2	Instrumen Kebijakan Fiskal Di Indonesia.....	32
2.4	Derajat Kinerja Keuangan Daerah.....	33
2.4.1	Derajat Kemandirian Fiskal	33
2.4.2	Derajat Desentralisasi Fiskal	36
2.5	Otonomi Daerah	37
2.5.1	Pengertian Otonomi Daerah.....	37
2.5.2	Pengertian Otonomi Khusus	39
2.6	Penelitian Terdahulu.....	42
2.7	Kerangka Pemikiran	53
2.8	Hipotesis Penelitian	54
BAB III METODE PENELITIAN		55
3.1	Pedekatan Penelitian.....	55
3.2	Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	55
3.3	Unit Analisis dan Horizon Waktu	55
3.4	Sumber Data Penelitian	56
3.5	Definisi Operasional Variabel	56
3.6	Teknik Analisis Data	57
3.6.1	Statistik Deskriptif	57
3.6.2	Metode Penentuan Kriteria Derajat Kemandirian dan Desentralisasi Fiskal	58
3.6.3	Model Estimasi Regresi Data Panel.....	59
3.6.4	Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel.....	62
3.6.5	Uji Hipotesis.....	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		66
4.1	Hasil Penelitian.....	66
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	66
4.1.1.1	Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh.....	66

4.1.2	Deskripsi Data Penelitian.....	67
4.1.2.1	Data Kemiskinan	68
4.1.2.2	Data Derajat Kemandirian Fiskal.....	70
4.1.2.3	Data Derajat Desentralisasi Fiskal	72
4.1.3	Estimasi Regresi Data Panel	74
4.1.3.1	Hasil Chow Test	74
4.1.3.2	Hasil Hausman Test.....	75
4.1.3.3	Hasil Lagrange Multiplier Test.....	76
4.1.4	Hasil Uji Goodnes of Fit	77
4.1.5	Hasil Uji Siginifikansi Parameter Individu (Uji t)	79
4.1.6	Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji f)	79
4.1.7	Hasil Koefisien Determinasi (R ²).....	79
4.2	Pembahasan	80
4.2.1	Pengaruh Derajat Kemandirian Fiskal Terhadap Kemiskinan.....	80
4.2.2	Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		83
5.1	Kesimpulan.....	83
5.2	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA		86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun 2008-2021.	1
Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Aceh Tahun 2008-2021.....	2
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	56
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Derajat Kemandirian Daerah	58
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Daerah	58
Tabel 4.1 Hasil Chow Test.....	75
Tabel 4.2 Hasil Hausman Test.....	76
Tabel 4.3 Hasil Lagrange Multiplier Test.....	77
Tabel 4.4 Random Effect Model.....	78

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh Tahun 2008-2021 (Ribu Jiwa).....	68
Grafik 4.2 Rata-Rata Kemiskinan Di 23 Kab/Kota Provinsi Aceh Tahun 2008-2021 (Ribu Jiwa).	69
Grafik 4.3 Rata-Rata Kemandirian Fiskal Di 23 Kab/Kota Provinsi Aceh Tahun 2008-2021 (Dalam Persentase).....	70
Grafik 4.4 Rata-Rata Derajat Kemandirian Fiskal Di 23 Kab/Kota Provinsi Aceh Tahun 2021 (Dalam Persentase).....	71
Grafik 4.5 Rata-Rata Desentralisasi Fiskal Di 23 Kab/Kota Provinsi Aceh Tahun 2008-2021 (Dalam Milyar).....	72
Grafik 4.6 Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Di 23 Kab/Kota Provinsi Aceh Tahun 2021 (Dalam Persentase).....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Data Penelitian Badan Pusat Statistik Dan Kementrian Keuangan	90
Lampiran 1.2 Hasil Regresi Dengan Program Eviews 9.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak di berlakukannya otonomi daerah di Indonesia dan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 32 sampai 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten dan pemerintah Kota telah mendapatkan wewenang untuk mengatur daerah nya sendiri. Dengan adanya pemberian otonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerahnya sendiri, maka di harapkan akan menciptakan efisiensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang telah di tetapkan sebagai daerah otonomi.

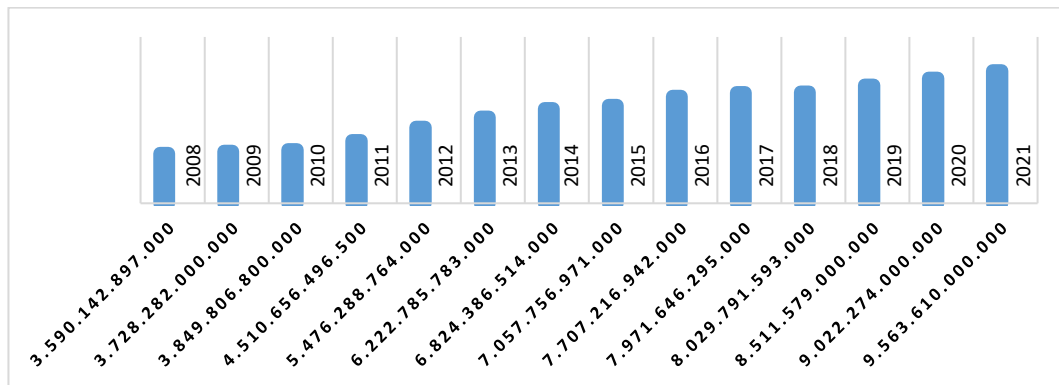
Penetapan Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia pasca konflik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan perekonomian. Namun pada tahun 2021 provinsi Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera, karena dana otonomi khusus dan dana APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) belum di manfaatkan secara baik, dan dana otonomi khusus belum mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat.¹

Sejak di berikannya dana otonomi khusus di tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 total dana otonomi khusus yang diterima oleh Provinsi Aceh sebesar 88,43 Triliun. Nominal yang diperoleh tersebut sangatlah besar, pengelolaan dana

¹ Chandra Gian Asmara, "Kaya Sumber alam, kenapa Aceh jadi daerah termiskin", <https://www.cnbcindonesia.com>. Diunduh tanggal 19 Maret 2022.

otonomi khusus juga belum di kelola dengan maksimal, di buktikan dengan sisa dana otonomi khusus tahun 2013 sampai 2020 sebesar 7,7 Triliun.²

Gambar 1.1
Jumlah Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun 2008-2021



Sumber : Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2020 dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia.

Dari gambar 1.1 terlihat bahwa dana otonomi khusus terus meningkat setiap tahunnya. Provinsi Aceh menerima dana otonomi khusus sebesar 3.590 triliun tahun 2008, kemudian terus meningkat sampai dengan tahun 2021 sebesar 9.563 triliun. Penerimaan dana otonomi khusus provinsi Aceh meningkat secara bertahap sesuai dengan kenaikan DAU (Dana Alokasi Umum) Nasional bergantung pada kenaikan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)³.

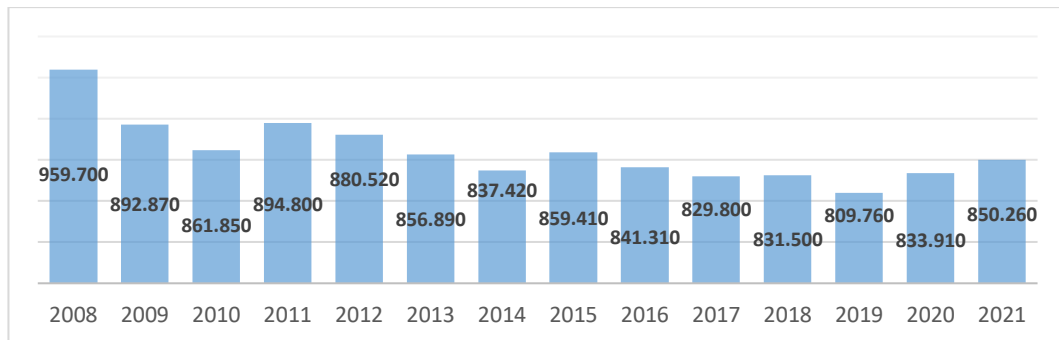
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa di tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Aceh adalah sebanyak 850 ribu orang, pada bulan Maret sampai September, angka kemiskinan meningkat 0,20 persen atau 16 ribu orang sejak bulan Maret 2021 hingga September 2021, pada tahun 2020 lalu Badan Pusat Statistik

² Forum Group Discussion, "Evaluasi pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh", <https://djk.kemenkeu.go.id>. Diunduh tanggal 27 Juli 2022.

³ Bappeda Aceh, "Laporan Pengukuran Kemiskinan Aceh tahun 2021", https://bappeda-dev.acehprov.go.id/media/2022.08/kemiskinan_cetak1.pdf. Diunduh tanggal 22 Oktober 2022

(BPS) mencatat, penduduk miskin di Aceh berkisar 15,43 persen atau sebanyak 833 ribu orang.⁴

Gambar 1.2
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Aceh Tahun 2008-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik (2008-2021).

Dari gambar 1.2 terlihat bahwa angka kemiskinan di Aceh mengalami fluktuasi, dimana pada Tahun 2019 mengalami penurunan angka kemiskinan dikarenakan mayoritas penduduk di Aceh banyak berada di pedesaan yang bermata pencarian sebagai petani, nelayan dan perkebunan, sehingga angka kemiskinan di pedesaan sudah menurun, secara kumulatif jumlah penduduk miskin di Aceh juga ikut menurun.⁵ Angka kemiskinan naik kembali pada tahun 2020 sampai 2021, hal ini disebabkan karena adanya penambahan penduduk karena kembalinya para pekerja dari luar daerah karena pandemi. Hasilnya Aceh menempati ranking dengan provinsi termiskin di Sumatra.

Tingginya angka kemiskinan di Aceh sudah terjadi sejak tahun 2000, dimana di tahun 2000 angka kemiskinan sebanyak 595 ribu jiwa dan angka kemiskinan

⁴ BPS, "Jumlah penduduk miskin menurut Kab Kota di Aceh", <https://aceh.bps.go.id>. Diunduh tanggal 19 Maret 2022.

⁵ Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, "Penurunan Kemiskinan Aceh Dinilai Dampak Kenaikan Produksi Padi, Angka Kemiskinan Capai 21,85 Persen", <https://distanbun.acehprov.go.id>. Diunduh tanggal 25 Oktober 2022.

terus naik dari tahun 2001 hingga tahun 2007 dimana angka kemiskinan di tahun 2007 sebanyak 1.083.500 juta jiwa.⁶ Dana otonomi khusus Provinsi Aceh yang sudah diberikan Pemerintah Sejak tahun 2008 sampai tahun 2021 masih belum dimanfaatkan secara baik. Aceh mempunyai kekayaan alam yang besar, namun optimalisasi dari sumber daya alam tersebut masih rendah.⁷

Otonomi daerah merupakan kondisi dengan melihat kemampuan daerah melalui fungsi pemerintahan yang cepat, dekat dan tepat sehingga manajemen pemerintahan dapat tertata dengan responsive, akuntabel, transparan dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat Pemerintah daerah yang merupakan pemegang mandat pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah mempunyai peranan terhadap pengelolaan sumber daya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸

Salah satu ciri pertama suatu daerah mampu melakukan otonomi dinyatakan pada kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya untuk tujuan tingkat angka proporsi ketergantungan pada pemerintah pusat yang semakin kecil dan diharapkan bahwa pendapatan asli suatu daerah harus menjadi alat utama dalam dana pembangunan ekonomi daerah. Tujuan dari otonomi suatu daerah dinyatakan sebagai untuk menekan angka Kemiskinan dalam suatu daerah.

⁶ BPS, "Jumlah penduduk miskin menurut Kab Kota di Aceh", <https://aceh.bps.go.id>. Diunduh tanggal 30 Juli 2022.

⁷ Cantika Adinda, "Aceh jadi provinsi termiskin se sumatera ini biang keroknya", <https://www.cnbcindonesia.com>. Diunduh tanggal 19 Maret 2022.

⁸ Milda Handayani, "Analisis kemandirian dan kemampuan keuangan daerah terhadap kemiskinan di kabupaten bogor", (Feby, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2021), h. 23.

Adanya otonomi suatu daerah memberikan kewenangan kepada masing-masing suatu daerah untuk mampu mengelola suatu daerah untuk tujuan lebih luas. Pemerintah suatu daerah diharapkan mampu menggali sumber penghasilan pendapatan asli suatu daerah sehingga akan meningkatkan tingkat angka kemandiriannya terhadap pusat.⁹

Dalam kebijakan fiskal terdapat komponen penting yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu pengeluaran pemerintah dimana dalam teori ekonomi Keynes terdapat efek multiplier atau angka pengganda akibat penambahan jumlah konsumsi pemerintah yang berfungsi sebagai alat stabilitas ekonomi serta dapat menambah tingkat kesempatan kerja.¹⁰

Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan kemiskinan. Ada suatu korelasi menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.¹¹

Keberhasilan daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari bagaimana daerah dapat menanggulangi kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini menandakan bahwa daerah mampu secara efektif dan efisien dalam

⁹ Muhammad Khadafi, "Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana otonomi khusus terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh periode 2010-2017" (Febi, Universitas Malikussaleh, 2020), h.23.

¹⁰ R abdi aziiz bagaskoro, "keynesian model;Analisis dampak kebijakan moneter dan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia" (FEBI, universitas Muhamadiyah Malang, 2019), h.4.

¹¹ Syaripah Fitriana, "Pengaruh pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Jambi", (FEBI, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), h. 5.

melaksanakan pembangunan daerahnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat derajat kemandirian dan desentralisasi fiskal pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di provinsi Aceh.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dideskripsikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Dana otonomi khusus belum berkontribusi dengan baik dalam mengatasi kemiskinan.
2. Tingkat kemandirian fiskal masih tergolong rendah.
3. Sumber daya APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) masih tergolong rendah.

1.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini dilihat berdasarkan derajat kemandirian dan desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di provinsi Aceh pada era otonomi khusus. Penelitian ini khusus dilakukan dengan data kemiskinan provinsi Aceh tahun 2008- 2021.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kategori rata-rata derajat kemandirian fiskal pada 23 Kabupaten di Aceh?
2. Apakah kategori rata-rata derajat desentralisasi fiskal pada 23 Kabupaten di Aceh?

3. Apakah derajat kemandirian fiskal mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Aceh?
4. Apakah derajat desentralisasi fiskal mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Aceh?
5. Apakah derajat kemandirian dan desentralisasi fiskal mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi Aceh?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat derajat kemandirian fiskal dalam mengatasi kemiskinan di provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui tingkat derajat desentralisasi fiskal dalam mengatasi kemiskianan di provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui tingkat derajat kemandirian dan desentralisasi fiskal dalam mengatasi kemiskinan di provinsi Aceh.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain adalah:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang berguna bagi pembaca mengenai derajat kemandirian dan desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di provinsi Aceh era otonomi khusus.

- b. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Manfaat secara praktis
Memberikan informasi bagi Pemerintah Aceh mengenai kemandirian dan desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di provinsi aceh di era otonomi khusus.

1.6 Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa istilah yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

1. Derajat kemandirian fiskal adalah kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah tanpa tergantung dari bantuan luar, termasuk pemerintah pusat.¹²
2. Derajat desentralisasi fiskal adalah bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang, dan sumber-sumber daya (dana, personil dan lain-lain) dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah.¹³
3. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya atau didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum.¹⁴

¹² BPK, "Laporan hasil revidu atas kemandirian fiskal Pemerintah Daerah tahun anggaran 2018 dan 2019", www.bpk.go.id . Di unduh pada tanggal 19 maret 2022.

¹³ Hadi Hasana, "Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal" dalam Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Maret 2011, h. 46-58.

¹⁴ Abdul Rohman, "Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin Desa", Jurnal Pembangunan Perdesaan", Vol. IV No. 2, (Agustus, 2004), h. 147.

4. Otonomi khusus adalah suatu desentralisasi sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁵
5. Anggaran Pendapatan dan belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.¹⁶

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan dan pedoman penulisan.

Bab II Landasan Teoritis

Memaparkan mengenai pengertian pengertian, penelitian terdahulu, kerangka konsep dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Menguraikan mengenai lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, identifikasi dan operasional variable, teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Berisi tentang gambaran umum objek Penelitian, deskripsi data penelitian, uji persyaratan analisis, uji hipotesis dan analisis peneliti.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

¹⁵ Suharyo, "Otonomi khusus Aceh dan Papua di tengah fenomena korupsi, suatu strategi penindihan hokum" (Jakarta, Vol 18, No 3, 2018).

¹⁶ Sailal Arimi, "Analisis faktor yang mempengaruhi keterlambatan pengesahan anggaran Pendapatan dan belanja Aceh tahun 2010" (Tesis, UGM S2 Magister Ekonomi Pembangunan 2011).